

Implementasi Program Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun (Studi di KUD Bratajaya Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan)

Anis Fadilah¹ Hendry Andry²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin Nasution
No. 113 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia
e-mail: nisfadilah@student.uir.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the PKSP program, which aims to improve the productivity and welfare of oil palm farmers. The research method used is descriptive with a qualitative approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation. The key informants in this study were the head of the replanting team, farmers, and relevant officials from the Pelalawan Regency Agriculture and Livestock Service. The results show that the implementation of the PKSP program at KUD Bratajaya encountered various challenges, including a lack of understanding among farmers about the importance of replanting, limited access to resources and information, and doubts about the effectiveness of new techniques. Despite this, the program successfully increased the yields and incomes of participating farmers. Effective outreach, ongoing government support, and active farmer involvement are crucial for the program's success. This study suggests the need for increased outreach, technical support, access to financing, and strengthening networks among farmers to encourage participation and effectiveness of the PKSP program going forward. With these steps, it is hoped that this program can provide more significant benefits to the welfare of oil palm farmers in Pelalawan Regency.

Keywords: Implementation, Rejuvenation Of Oil Palm Plantations, Pangkalan Kuras District

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program PKSP, yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani kelapa sawit. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan utama dalam penelitian ini adalah ketua tim peremajaan, petani, serta pejabat terkait dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pelalawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program PKSP di KUD Bratajaya mengalami berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman petani tentang pentingnya peremajaan, keterbatasan akses terhadap sumber daya dan informasi, serta keraguan akan efektivitas teknik baru. Meskipun demikian, program ini berhasil meningkatkan hasil panen dan pendapatan petani yang berpartisipasi. Sosialisasi yang efektif, dukungan berkelanjutan dari pemerintah, dan keterlibatan aktif petani sangat penting untuk keberhasilan program. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan sosialisasi, dukungan teknis, akses terhadap pembiayaan, serta penguatan jaringan antar petani untuk mendorong partisipasi dan efektivitas program PKSP ke depan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan program ini dapat memberikan manfaat yang lebih signifikan bagi kesejahteraan petani kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan.

Kata kunci: Implementasi, Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Kecamatan Pangkalan Kuras

Pendahuluan

Peremajaan kelapa sawit merupakan bagian dari budidaya tanaman kelapa sawit. Kegiatan peremajaan kelapa sawit disebut juga dengan replanting yang dapat diartikan sebagai menanam ulang tanaman kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit membutuhkan peremajaan apabila sudah tidak produktif, tanaman tua atau tanaman rusak. Bahwa untuk mencapai pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit yang efisien dan berkelanjutan, salah satu upaya dilakukan melalui peremajaan terhadap tanaman yang kurang produktif, tua dan/ atau rusak dengan dukungan pengembangan sumber daya manusia dan bantuan sarana dan prasarana sesuai dengan keputusan direktur jendral perkebunan nomor: 29/KPTS/KB.120/3/2017 DAN Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 07 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana Dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, pada pasal 15 ayat 2, bahwa peremajaan dapat dilakukan dengan beberapa kriteria yaitu tanaman telah melewati umur ekonomis 25(dua puluh lima) tahun, produktivitas kebun kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) ton TBS/ha/tahun pada umur paling sedikit 7 (tujuh) tahun, atau kebun yang menggunakan benih tidak unggul pada umur tanaman paling sedikit 2 (dua) tahun. Lingkungan yang bersih merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh setiap daerah dan isu ini tidak hanya bersifat lokal namun sudah masuk kedalam ranah global, mengingat dampak yang ditimbulkan cukup luas mulai dari kesehatan masyarakat, kualitas hidup hingga keberlanjutan ekosistem. Penanganan masalah kebersihan lingkungan ini merupakan isu jangka panjang yang membutuhkan penanganan berkelanjutan dan tidak dapat ditunda pelaksanaannya.

Kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan yang memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu melalui program peremajaan kelapa sawit pekebun (PKSP). Program peremajaan kelapa sawit pekebun (replanting) merupakan salah satu langkah strategi pemerintahan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani sawit. Melalui program ini, petani dapat melakukan penggantian tanaman kelapa sawit tua atau tidak produktif dengan tumbuhan baru, baik secara keseluruhan maupun secara bertahap.

Perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Pangkalan Kuras telah dioperasikan sejak tahun 1990an. Oleh karena itu sebagian besar dari tanaman kelapa sawit tersebut pada saat ini telah memasuki tahap akhir siklus produksi sehingga perlu direncanakan kegiatan replanting. Kecamatan Pangkalan Kuras memiliki potensi yang besar dibidang perkebunan yaitu kelapa sawit, seperti mayoritas Kecamatan di Kabupaten Pelalawan, produksi sektor pertanian yang paling besar disumbangkan oleh hasil peremajaan kelapa sawit pekebun (PKSP). Pada tahun 2022 produksi kelapa sawit mencapai 69.454,00 ton (BPS, 2023). Dalam kehidupan sehari hari petani , kelapa sawit menjadi salah satu sumber mata pencarian terbesar di kecamatan Pangkalan kuras untuk menunjang kehidupan sehari hari dengan adanya perkebunan kelapa sawit rakyat ini dapat meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit pekebun, yang berdampak pada peningkatan pendapatan petani. Selain itu, replanting juga membantu mengurangi risiko penurunan hasil produksi secara drastis akibat usia tanaman yang sudah tua.

KUD Bratajaya didirikan sebagai koperasi unit desa untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya petani kelapa sawit di Desa Surya Indah. Koperasi ini berperan penting dalam mengelola peremajaan kebun sawit rakyat dengan dukungan dana

dari pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Pada Februari 2022, Bupati Pelalawan secara resmi membuka penumbangan perdana peremajaan sawit rakyat yang dikelola KUD Bratajaya, sebagai bentuk apresiasi dan dukungan pemerintah kepada para petani kelapa sawit di desa tersebut agar lebih mandiri dan sejahtera.

Singkatnya, Desa Surya Indah tumbuh dari program transmigrasi menjadi desa definitif yang mandiri, dengan KUD Bratajaya sebagai wadah koperasi yang mendukung petani sawit dalam meningkatkan kesejahteraan melalui program peremajaan kelapa sawit rakyat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka muncul ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Implementasi Program Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun (Studi di KUD Bratajaya Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan)”**.

Tinjauan Pustaka

Konsep Administrasi Publik

Menurut Newman dalam Handayaniingrat (1990:2) memberikan pendapatnya mengenai *Administration has been defined as the guidance, leadership and control of the effort of a group of individuals towards some common goal*. (Administrasi didefinisikan sebagai bimbingan, kepemimpinan dan pengawasan dari pada usaha-usaha kelompok individu-individu terhadap tercapainya tujuan bersama) Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah kegiatan memberikan pengarahan, bimbingan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha kelompok dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Administrasi Publik adalah proses penyelenggaraan kehendak publik (public will) sebagaimana yang dinyatakan di dalam hukum, dengan kata lain pengoordinasian usaha bersama untuk mengimplementasikan kebijakan umum. Lebih tegas dapat dikemukakan bahwa administrasi berkenaan dengan cara unit perumus kebijakan dari keseluruhan pemerintahan-pemilih, legislatif atau eksekutif.

Secara sederhana, administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik. Meskipun sama-sama mengkaji tentang organisasi, administrasi publik ini berbeda dengan ilmu manajemen jika manajemen mengkaji tentang pengelolaan organisasi swasta, maka administrasi publik mengkaji tentang organisasi publik/pemerintah, seperti departemen-departemen, dan dinas-dinas, mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat pusat. Kajian ini termasuk mengenai birokrasi penyusunan, pengimplementasian, dan pengevaluasian kebijakan publik administrasi pembangunan pemerintahan daerah dan *good governance* (Panjaitan & Pardede, 2021).

Konsep Organisasi

Menurut E. Wight Bakke (dalam Kusdi, 2009:5) organisasi adalah suatu sistem berkelanjutan dari aktivitas-aktivitas manusia yang terdiversifikasi dan terkoordinasi, yang mempergunakan, mentransformasi, dan menyatupadukan seperangkat khusus manusia, material, modal, gagasan dan sumber daya alam menjadi satu kesatuan pemecahan masalah yang unik dalam rangka memuaskan kebutuhan-kebutuhan manusia dalam interaksinya dengan sistem-sistem lainnya dari aktivitas manusia dan sumber daya dalam lingkungannya.

Organisasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *“orgonon”* dan istilah latin *“organum”* yang dapat berarti alat, bagian, anggota atau badan. Organisasi adalah sarana atau alat mencapai

tujuan. Oleh karena itu dikatakan organisasi adalah wadah atau wahana, kegiatan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan (Sufian Hamim, 2013).

Melalui pendekatan struktur Siagian mendefinisikan organisasi sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama dan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan (Zulkifli, 2014).

Konsep Manajemen

Manajemen menurut George Terry yang dikutip oleh Syafie (2006:49) dalam bukunya Ilmu Administrasi Publik diartikan bahwa : Manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya.

Manajemen menurut Siagian (1978) yang dikutip Silalahi (2011:137) dalam bukunya Asas-Asas Manajemen mendefinisikan bahwa : “Manajemen dapat didefinisikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain”. Pendapat diatas menjelaskan bahwa manajemen adalah suatu usaha memanfaatkan ataupun mengembangkan sumber daya yang ada dengan menggunakan kapasitas seorang pegawai untuk menyelesaikan tugasnya dimana seorang pegawai tersebut diarahkan dan diawasi agar tujuan organisasi dapat tercapai.

Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideology dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.

Menurut Bridgeman dan Davis, 2004 dalam Edi Suharto (2007:5) menerangkan bahwa kebijakan publik setidaknya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan (*objective*), sebagai pilihan tindakan yang legal atau sah secara hukum (*authoritative choice*), dan sebagai hipotesis (*hypothesis*).

Adapun dari Carl Friedrich, 1969 dalam Leo Agustino (2006:7) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan terutama dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implimentasi kebijakan dari sudut pandang teori siklikal (*cyclical theory*) maka implementasi itu akan diperlukan sebagai suatu tahapan penting yang berlangsung dari proses kebijakan,

terutama setelah wacana legal formal, biasanya berupa undang-undang, peraturan, ketetapan, atau bentuk-bentuk produk lainnya, dianggap sudah usai.

Dalam arti seluas-luasnya, implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (stakeholders), aktor, organisasi (public atau privat), prosedur, dan teknik secara sinergis yang digerakan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang dikehendaki.

Teori George C. Edward III menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang jelas tentang tujuan kebijakan sangat penting. Sumber daya yang memadai, seperti anggaran dan SDM, juga krusial. Sikap positif dan komitmen dari pelaksana kebijakan juga berpengaruh besar. Struktur birokrasi yang mendukung juga mempermudah implementasi.

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George C. Edwards III sebagai berikut :

1. Komunikasi

Faktor pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut George C. Edward III yaitu komunikasi. Komunikasi menurutnya lebih lanjut sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik, implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

2. Sumberdaya

Menurut George C. Edward III bahwa sumber-sumber yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan adalah salah satunya sumber daya yang tersedia, karena menurut George C Edward III sumber daya merupakan sumber penggerak dan pelaksana. Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga sumber daya dapat berjalan dengan baik yaitu: Sumber daya manusia, Sumber daya anggaran, Sumber daya sarana dan prasarana. Sumber daya.

3. Disposisi (Sikap atau Watak Pelaksanaan)

Disposisi faktor ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan public bagi Geoerge C. Edward III adalah disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah factor penting ketiga dalam pendekatan mengenai

pelaksanakan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bisa disposisi merujuk pada sikap, perilaku, dan kecenderungan petani serta anggota tim dalam menjalankan program tersebut.

4. Struktur Birokrasi

Menurut George C. Edward III yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia maka hal ini akan menyebabkan sumber daya- sumber daya menjadi menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Konsep Peremajaan Sawit Rakyat

Peremajaan kelapa sawit merupakan bagian dari budidaya tanaman kelapa sawit. Kegiatan peremajaan kelapa sawit disebut juga dengan replanting yang dapat diartikan sebagai menanam ulang tanaman kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit membutuhkan peremajaan apabila sudah tidak produktif, tanaman tua atau tanaman rusak. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 07 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana Dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, pada pasal 15 ayat 2, bahwa peremajaan dapat dilakukan dengan beberapa kriteria yaitu tanaman telah melewati umur ekonomis 25(dua puluh lima) tahun, produktivitas kebun kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) ton TBS/ha/tahun pada umur paling sedikit 7 (tujuh) tahun, atau kebun yang menggunakan benih tidak unggul pada umur tanaman paling sedikit 2 (dua) tahun.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Menurut Moleong (2008: 6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Menurut Saryono (2010: 49) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2011: 55), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara

purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan tri angkulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian ini dilakukan di KUD Bratajaya Desa Surya Indah, Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Peneliti tertarik melakukan penelitian ini untuk melihat Implementasi Program Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun.

Adapun jenis dan sumber data yang diperoleh dalam penelitian terbagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut :

1. Data primer

Data primer adalah data mentah yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti pada saat di lapangan. Data primer ini biasanya didapatkan dari seorang key informan ataupun informan seperti catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan, dan juga dokumentasi.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan berdasarkan sumber-sumber yang telah ada atau sudah jadi. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), buku, jurnal, penelitian terdahulu serta dokumen-dokumen yang diperoleh dari instansi terkait.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil dan analisis data dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Ada beberapa indikator dan sub indikator yang penulis paparkan untuk mengetahui pembahasan dalam penelitian yang berjudul Implementasi Program Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun (PKSP) Di Koperasi Unit Desa Bratajaya Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Menurut George C. Edward III, implementasi kebijakan adalah proses krusial yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan publik, di mana perumusan dan pelaksanaan kebijakan harus direncanakan dengan baik agar tujuan kebijakan tercapai. George memaparkan 4 indikator yaitu komunikasi, sumber daya, sikap atau watak pelaksanaan, dan struktur birokrasi. Untuk pembahasan yang lebih jelas dan mendalam mengenai hasil dan pembahasan penelitian dapat dilihat sebagai berikut:

1. Komunikasi

- a. Transmisi

Bahwa tim peremajaan telah mengimplementasikan berbagai strategi efektif untuk menyampaikan informasi mengenai Program Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun (PKSP) kepada para pekebun di KUD Bratajaya. Strategi tersebut mencakup pelatihan langsung di lokasi perkebunan, sesi konsultasi pribadi, distribusi materi edukasi, dan pemanfaatan media sosial. Melalui pendekatan ini, para pekebun, baik yang telah meremajakan maupun yang belum, merasa lebih teredukasi dan termotivasi untuk mengikuti program. Ini menunjukkan upaya tim peremajaan dalam membangun pemahaman dan kepercayaan di kalangan pekebun, serta menekankan potensi manfaat jangka panjang dari peremajaan sawit bagi peningkatan hasil kebun.

- b. Konsistensi

Tim peremajaan kelapa sawit telah berhasil menyampaikan informasi mengenai program PKSP secara efektif kepada semua pekebun di KUD Bratajaya. Melalui sesi sosialisasi rutin, penggunaan teknologi seperti grup WhatsApp dan media sosial, serta penyediaan buku panduan dan leaflet, mereka memastikan bahwa setiap pekebun mendapatkan

pemahaman yang jelas dan detail tentang program tersebut. Cara ini tidak hanya membuat pekebun merasa terinformasi, tetapi juga memberdayakan mereka untuk terlibat aktif dalam peremajaan. Dengan demikian, program PKSP dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi komunitas petani.

2. Sumber Daya

a. Fasilitas

Program peremajaan kelapa sawit memiliki potensi besar untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Meskipun banyak petani merasakan manfaat dari bantuan bibit unggul dan pelatihan, masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan modal, proses yang rumit, dan kebutuhan akan pendampingan yang lebih intensif dalam pengendalian hama dan penyakit. Keraguan dan kekhawatiran yang muncul di kalangan petani mencerminkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dan inklusif dalam program ini. Dengan memahami dan mengatasi kebutuhan serta tantangan yang dihadapi petani, intervensi yang lebih efektif dapat dirancang untuk mendorong partisipasi yang lebih luas dan memastikan keberlanjutan hasil jangka panjang dari program peremajaan kelapa sawit.

b. Anggaran dan Sumber Daya Finansial

Alokasi dana yang tepat dan dukungan finansial yang memadai sangat penting untuk keberhasilan program peremajaan kebun. Partisipasi aktif petani dalam proses alokasi anggaran dapat meningkatkan efektivitas program, sementara transparansi dan aksesibilitas dana menjadi kunci untuk memastikan bahwa semua petani, terutama yang kurang beruntung, dapat memanfaatkan sumber daya yang ada. Selain itu, kombinasi antara dukungan finansial dan pelatihan yang efektif mampu memberdayakan petani untuk meningkatkan produktivitas. Evaluasi berkala terhadap penggunaan anggaran dan dampaknya diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif, serta memperbaiki mekanisme distribusi dana agar lebih inklusif. Dengan langkah-langkah ini, program dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi komunitas pertanian dan mendukung ketahanan pangan secara keseluruhan.

3. Disposisi (Sikap atau Watak Pelaksanaan)

a. Kemampuan

penilaian kemampuan anggota dalam program PKSP dilakukan melalui berbagai metode, termasuk observasi, umpan balik, dan evaluasi kinerja. Namun, ada tantangan terkait partisipasi petani yang merasa tidak mendapatkan perhatian yang cukup, yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas program secara keseluruhan. Dukungan tim peremajaan menunjukkan bahwa perhatian, bimbingan, dan penilaian yang adil sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan diri dan partisipasi petani. Kunjungan rutin dan umpan balik positif

dari tim menciptakan lingkungan yang mendukung, di mana petani merasa dihargai dan termotivasi untuk berinovasi. Pendekatan yang inklusif dan responsif dalam penilaian memungkinkan anggota untuk memahami proses peremajaan dengan lebih baik, memperbaiki kekurangan, dan tetap fokus pada tujuan. Secara keseluruhan, dukungan yang konsisten dari tim peremajaan tidak hanya meningkatkan kemampuan individu, tetapi juga memperkuat keberhasilan program secara keseluruhan.

b. Komitmen dan Dedikasi

Penilaian kemampuan anggota dalam program PKSP dilakukan melalui berbagai metode, termasuk observasi, umpan balik, dan evaluasi kinerja. Namun, ada tantangan terkait partisipasi petani yang merasa tidak mendapatkan perhatian yang cukup, yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas program secara keseluruhan. Dukungan tim peremajaan menunjukkan bahwa perhatian, bimbingan, dan penilaian yang adil sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan diri dan partisipasi petani. Kunjungan rutin dan umpan balik positif dari tim menciptakan lingkungan yang mendukung, di mana petani merasa dihargai dan termotivasi untuk berinovasi. Pendekatan yang inklusif dan responsif dalam penilaian memungkinkan anggota untuk memahami proses peremajaan dengan lebih baik, memperbaiki kekurangan, dan tetap fokus pada tujuan. Secara keseluruhan, dukungan yang konsisten dari tim peremajaan tidak hanya meningkatkan kemampuan individu, tetapi juga memperkuat keberhasilan program secara keseluruhan.

4. Struktur Birokrasi

a. Organisasi yang Mendukung Pelaksana

Pelaksanaan Program Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun (PKSP) di KUD Bratajaya menunjukkan pentingnya struktur organisasi yang terencana dan kolaborasi antara semua pihak. Dengan adanya peran yang jelas dari ketua tim, pemerintah, dan anggota kelompok tani, program ini berupaya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Namun, tantangan seperti keraguan dari petani yang tidak meremajakan, seperti Bapak Prapto Wiyono dan Ibuk Fatmawati, perlu diatasi melalui edukasi dan bukti nyata tentang keberhasilan peremajaan. Di sisi lain, petani yang telah berhasil, seperti Bapak Diman dan Ibuk Usrini, berfungsi sebagai contoh positif yang dapat menginspirasi petani lain. Secara keseluruhan, keberhasilan program ini tergantung pada komunikasi yang efektif, dukungan berkelanjutan dari pemerintah, serta upaya untuk membangun kepercayaan di kalangan petani. Dengan pendekatan yang kolaboratif dan fokus pada edukasi, diharapkan lebih banyak petani akan berpartisipasi dalam peremajaan, sehingga program ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi komunitas.

b. Prosedur dan Aturan yang Memudahkan Pelaksana (SOP)

Prosedur yang telah ditetapkan mencakup langkah-langkah yang jelas, mulai dari pengidentifikasian lahan hingga evaluasi hasil. Sosialisasi prosedur dilakukan melalui berbagai metode, seperti rapat rutin, seminar, dan diskusi kelompok tani, yang membantu anggota memahami dan melaksanakan program dengan lebih baik. Namun, terdapat tantangan dalam menjangkau seluruh petani, terutama

mereka yang tidak meremajakan, yang merasa kurang mendapatkan informasi. Secara keseluruhan, keterlibatan berbagai pihak dan metode sosialisasi yang beragam menjadi kunci dalam meningkatkan partisipasi dan keberhasilan program peremajaan kelapa sawit di KUD Bratajaya.

Kesimpulan

Program Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun (PKSP) di KUD Bratajaya, Desa Surya Indah, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, dilaksanakan dengan tujuan utama untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas tanaman kelapa sawit serta kesejahteraan para petani. Implementasi program ini melibatkan serangkaian kegiatan, termasuk pelatihan teknik budidaya yang baik, penyuluhan tentang manajemen tanaman, dan penyediaan bibit unggul yang sesuai dengan kondisi lokal. Hasil dari program ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam hasil panen, di mana petani yang berpartisipasi mengalami pertumbuhan pendapatan yang lebih baik dibandingkan sebelum program dilaksanakan. Meskipun demikian, program ini tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya keterlibatan aktif dari sebagian petani dalam setiap tahap program, yang mengakibatkan ketidakmerataan hasil yang diperoleh. Selain itu, ada kendala dalam akses terhadap sumber daya dan informasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan tanaman yang optimal. Beberapa petani masih terhambat oleh keterbatasan pengetahuan dan keterampilan, serta kurangnya akses kepada teknologi modern yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dengan meningkatkan partisipasi petani melalui pendekatan yang lebih inklusif dan memberdayakan. Diperlukan dukungan berkelanjutan dari pemerintah dan lembaga terkait untuk memberikan akses yang lebih baik terhadap pelatihan, teknologi, dan informasi. Dengan langkah-langkah perbaikan ini, diharapkan program PKSP dapat lebih optimal dalam mencapai tujuannya, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi kesejahteraan petani kelapa sawit di daerah tersebut. Secara keseluruhan, PKSP menunjukkan potensi yang besar dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan, namun perlu ada upaya berkelanjutan untuk memperbaiki aspek-aspek yang masih kurang.

Daftar Pustaka

- Alamanda, A. E. (2023). Peran Pemerintah dalam Optimalisasi Pelaksanaan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit. *Wajah Hukum*, 7(1), 73-83.
- Alamanda, A. E., Mangar, I., Mutmainah, L., & Fajriyah, N. (2023). PERJANJIAN POLA KEMITRAAN DALAM PELAKSANAAN PEREMAJAAN TANAMAN KELAPA SAWIT. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 9(2), 488-513.
- Andy, H., & Tarmizi Yussa. (2020). *Perilaku & Etika Administrasi Publik*.
- Anggreany, S., Muljono, P., & Sadono, D. (2016). Partisipasi Petani Dalam Replanting Kelapa Sawit Di Provinsi Jambi. *Jurnal Penyuluhan*.
- Asti, P. D. A., Falatehan, A. F., & Putri, E. I. K. (2022, September). Implementasi Peremajaan Sawit Rakyat (Studi Kasus: Kud Tunas Muda Kabupaten Siak-Riau). In *Forum Agribisnis: Agribusiness Forum* (Vol. 12, No. 2, pp. 126-137).
- Budiharjo, A., & Suryadarma, I. (2018). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Peremajaan Sawit Rakyat di Sumatera Selatan. *Jurnal Agribisnis*.

- Eduardus Yoskar Ganadi, Sri Gunawan, Erick Firmansyah. Kajian Peremajaan Sawit Rakyat di Perkebunan Rakyat Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. *Jurnal INSTIPER*.
- Enjelina, D., & Mayarni, M. (2023). Kolaborasi Kelembagaan Dalam Percepatan Implementasi Peremajaan Sawit Rakyat (Psr) Dengan Pola Kemitraan Di Kabupaten Kampar. *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 032-040.
- Friska, Edmi. (2017). Penerapan Teknologi Peremajaan Kelapa Sawit Oleh Petani. Skripsi, Universitas Andalas.
- Gatot Pramuhadi, Muhammad Aji Setiawan, Nenda Fuji Putri Daliesta. Implementasi Kebijakan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalteng. (menggunakan teori Edward III).
- Ghandi, R. (2022). *Analisis Kesejahteraan Petani Karet Di Desa Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Iskandar, A., & Mulyadi, A. (2019). Strategi Pengembangan Peremajaan Kelapa Sawit Berbasis Masyarakat di Kalimantan Tengah. *Jurnal Perkebunan*.
- Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 29/KPTS/KB.120/3/2017 tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun.
- Lestari, D., & Nugroho, S. (2020). Dampak Sosial Ekonomi Program Peremajaan Kelapa Sawit di Desa Suka Maju, Riau. *Jurnal Pengembangan Masyarakat*.
- Ministry of Agriculture Indonesia. (2021). Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Noehamid, F. (2020). *Analisis Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Keputusan Petani Melakukan Peremajaan Kelapa Sawit Plasma di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Panggabean, B. T., Hutabarat, S., & Muwardi, D. (2023). Strategi Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Kabupaten Rokan Hilir. *Jurnal Triton*, 14(1), 216-230. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Pratama, A., & Yusran, R. (2022). Implementasi Kebijakan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada Program Peremajaan Sawit Rakyat di Desa Rantau Ikil Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 16691-16697.
- Rahmawan, B. (2022). *KAJIAN PERMODALAN PETANI DALAM MENGHADAPI PEREMAJAAN SAWIT RAKYAT (Studi Kasus Di Desa Surya Indah, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, RIAU)* (Doctoral dissertation, Intitut Pertanian Stiper Yogyakarta).
- S. R., & Triwidodo, H. (2024). Pengendalian Hama Terpadu pada Peremajaan Sawit Rakyat di Kecamatan Pangkalan Kuras, Riau. *Indonesian Journal of Agricultural Sciences/Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 29(3).
- Siahaan, A., & Harahap, T. (2019). Kendala dan Solusi dalam Peremajaan Kelapa Sawit di Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*.
- Sihombing, D., & Puspita, F. (2015). *Kajian Teknik Budidaya Tanaman Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq.) Petani Swadaya Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Provinsi Riau* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Silalahi, W., & Harahap, J. (2022). Evaluasi Implementasi Program Peremajaan Sawit Rakyat di Provinsi Riau. *Jurnal Kebijakan Publik*.
- Tambunan, F. F. H. (2020). Manajemen Peremajaan Kelapa Sawit Berkelanjutan. Bandung: Penerbit AgroMedia.

- Wachidah, M. F., Kusbandrijo, B., & Rochim, A. I. (2022). IMPLEMENTASI TUGAS KARANG TARUNA MENURUT PERMENSOS NOMOR 25 TAHUN 2019:(STUDI KASUS KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN KOTA SURABAYA). *PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469)*, 2(01), 124-132.
- Wibowo, W. H., & Junaedi, A. (2017). Peremajaan Kelapa Sawit di Seruyan Estate, Minamas Plantation Group.
- Yussa, T., & Andry, H. (2015). Perilaku dan Etika Administrasi Publik. *Pekanbaru, Marpoyan Tujuh*.

Internet :

- Badan Statistik Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kuras Dalam Angka (2023).
Dinas Perkebunan dan Perternakan Kabupaten Pelalawan tahun (2023)

Dokumen :

- Peraturan menteri pertanian republik indonesia nomor 03 tahun 2022 tentang pengelolaan sumber daya manusia, peremajaan, serta sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit.
- Peraturan Menteri Pertanian No.38 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Sawit Berkelanjutan Indonesia.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 18/Permentan/Kb.330/5/2016 Tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit.
- Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pelalawan Nomor 73 Tahun 2020 tentangan Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Pelalawan Tahun 2020-2024
- .
- Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor Produksi, Sertifikasi, 321/Kpts/Kb.020/10/2015 Tentang Pedoman Peredaran Dan Pengawasan Benih Tanaman Kelapa Sawit (*ElaeisGuineensis* Jacg).
- Pasal 1 ayat (1) peraturan menteri pertanian nomor 15 tahun 2020 mengenai persyaratan pengajuan usulan peremajaan sawit.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 ayat 3 menyebutkan bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan .
- Daftar pustaka merupakan sumber acuan/rujukan yang dijadikan bahan kutipan penulisan naskah. Penulisan daftar pustaka menggunakan aturan American Psychological Association (APA) Style. Jumlah sumber rujukan yang dijadikan daftar pustaka naskah minimal 15 judul literatur ilmiah (80% referensi primer dan 20% referensi sekunder). Sumber referensi primer, seperti: jurnal, (penyitiran jurnal Publika : Jurnal Ilmu Administrasi Publik minimal 2 sitiran) laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan makalah prosiding. Sumber referensi sekunder, seperti: buku dan sumber internet.

Sebaiknya penulisan kutipan menggunakan aplikasi reference manager Mendeley, berikut contoh daftar pustaka.

- Akçayır, M., Dünder, H., & Akçayır, G. (2016). What makes you a digital native? Is it enough to be born after 1980? *Computers in Human Behavior*, 60, 435–440. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.02.089>
- Anggadwita, G., & Palalić, R. (2020). Entrepreneurship in Indonesia: some contextual aspects. In *Research Handbook on Entrepreneurship in Emerging Economies* (pp. 179–204). <https://doi.org/10.4337/9781788973717.00018>